



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 143 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

Lembar Kedua      Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor 143 Tahun 2019  
Tanggal 3 Juli 2019

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.**

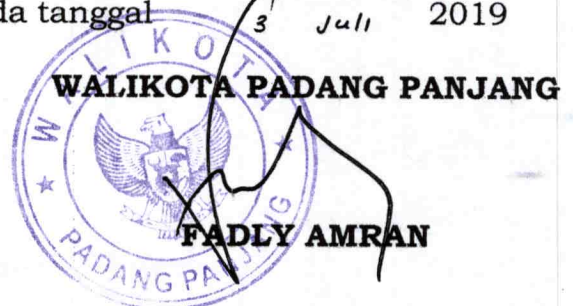
**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah acuan ukuran kinerja yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang serta pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 3 Juli 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang.

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

143 TAHUN 2019

3 Juli 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

Kondisi Akhir RPJMD	Target Yang Ingin Dicapai						Kondisi Existing	Satuan	Penjelasan Indikator	Indikator/Tujuan Sasaran (IKU)	Sasaran	Tujuan
	2019	2020	2021	2022	2023	2023						
	7	8	9	10	11	12	6	5	4	3	2	
	5.81	5.96	6.04	6.11	6.19	6.30	Indeks	PDRB tahun rencana/PDRB tahun sebelumnya x 100%	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	
	2.79	3.05	3.17	3.3	3.43	3.56	%	Sudah jelas	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1. Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		
	4.57	5.02	5.24	5.47	5.69	5.92	%	Sudah jelas	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran			
	2.19	2.28	2.33	2.37	2.42	2.46	%	Sudah jelas	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri			
	7.48	7.61	7.67	7.73	7.8	7.78	%	Sudah jelas	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			
	na	0.50	0.75	1.00	1.25	1.5	%	sudah jelas	6. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	2. Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan		
	66.17	65.25-66.57	65.62-66.84	65.79-67.14	66.33-67.65	66.33-67.65	Indeks	30 % dari Indeks Kualitas Air + 30 % dari Indeks Kualitas Udara + 40 % dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan	7. IKLH			
	44.12	48.19	50.42	52.80	55.34	58.05	Rp.juta	PDRB dibagi Penduduk Pertengahan Tahun	8. PDRB Perkapita		2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	6.17	5.45	5.03	4.60	4.18	3.75	%	Dihitung dengan Membagi Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Penduduk Keseluruhan di wilayah tertentu.	9. Angka Kemiskinan	3. Menurunnya Angka Kemiskinan		

			10 Indeks Gini	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Secara Menyeluruh. Nilai Indeks/Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan Adanya Pemerataan Pendapatan Yang Sempurna.	Indeks	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24
		4. Menurunnya Angka Pengangguran	11 Tingkat Pengangguran Terbuka	Perentase Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja	%	5.43	4.48	4.72	4.59	4.47	4.34	4.34
		5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	12 Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga	(Ribu Rupiah)	10.24	10.29	10.31	10.34	10.36	10.39	10.39
		6. Meningkatnya Pemerataan Kualitas daya saing pendidikan	13 Indeks Pembangunan Manusia	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup	Indeks	77.01	78.25	78.86	79.48	80.10	80.72	80.72
		3. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	14 Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Tahun	11.43	11.88	12.11	12.33	12.56	12.78	12.78
			15 Harapan lama sekolah	Lama nya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diselesaikan oleh anak pada umur tertentu dimasa akan datang.	Tahun	15.03	15.27	15.38	15.5	15.62	15.74	15.74
		7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	16 Angka Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu.	Tahun	72.46	72.47	72.47	72.48	72.48	72.49	72.49
		4. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamais	17 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani	%	95.16	96.37	97.28	98.19	99.09	100	100
		5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	18 Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Efektifitas reformasi birokrasi di pemerintahan	Indeks	54.94	62	64	66	68	70	70

		Nilai	58.69	B (60.1)	BB (70)	BB (74)	BB (78)	A (80,02)	A (80,02)
8. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah							
9. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	20 Opini BPK 21 Indeks Kepuasan Masyarakat	sudah jelas Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	77.44 (Baik)	78 (Baik)	79 (Baik)	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	82 (Baik)
	22 Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Total Belanja Partisipasi Masyarakat / Total Anggaran Belanja Langsung x 100%	2,29	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34
6. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	23 Indeks Pemberdayaan Gender	mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan	76.10	77,5	78,9	80,3	81,7	83,10	83,10

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN